



## Kesenjangan Digital Tingkat Ketiga pada Pemuda Pedesaan di Kabupaten Cianjur, Indonesia

### *Third Level Digital Divide among Rural Young People in Cianjur Regency Indonesia*

Ismail Fajar

Departemen Sosiologi, Universitas Indonesia, Jawa Barat, Indonesia.

email: [ismail.fajar91@ui.ac.id](mailto:ismail.fajar91@ui.ac.id)

Menerima: 13 Agustus 2021, Revisi: 6 September 2021, Diterima: 8 September 2021

#### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi kesenjangan digital pada pemuda pedesaan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia di masa pandemi Covid-19, menggunakan konsep kesenjangan digital tingkat ketiga yang digagas oleh Massimo Ragnedda (2017). Studi-studi sebelumnya tentang kesenjangan digital di masyarakat pedesaan dan pemuda cenderung membahas masalah kesenjangan digital tingkat pertama dan tingkat kedua yang berfokus pada kesenjangan akses dan perbedaan pengalaman dalam menggunakan TIK. Namun, penelitian-penelitian tersebut tidak mampu menjelaskan kesenjangan digital dalam mereproduksi ketimpangan sosial, sehingga penelitian ini mencoba mengeksplorasi reproduksi tersebut melalui analisis kesenjangan digital tingkat ketiga. Data kuantitatif dikumpulkan melalui kuesioner *online* yang diisi secara mandiri oleh 368 responden yang tersebar di empat desa yang mewakili karakteristik wilayah desa di Kabupaten Cianjur. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa gender, tingkat pendidikan, kelas pekerjaan dan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap tingkat pemanfaatan TIK bagi pemuda pedesaan di Kabupaten Cianjur. Selain itu, karakteristik pedesaan sebagai variabel kontrol memengaruhi hubungan antara variabel usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, kelas pekerjaan dan tingkat pendapatan dengan tingkat pemanfaatan TIK. Tingkat pemanfaatan TIK dalam studi ini menunjukkan fenomena kesenjangan digital tingkat ketiga, yaitu fenomena adanya gap antara mereka yang mendapat manfaat dari TIK dan mereka yang tidak mendapat manfaat dari TIK. Tingkat pemanfaatan TIK yang dipengaruhi oleh variabel-variabel di atas menunjukkan bahwa kesenjangan digital tingkat ketiga mereproduksi ketimpangan sosial yang telah ada di kalangan anak muda pedesaan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Faktor demografi, kondisi struktur sosial dan karakteristik wilayah pedesaan menjadi basis sosial yang timpang dan berpotensi untuk semakin diperparah dengan adanya perbedaan manfaat yang didapat oleh pemuda pedesaan di Kabupaten Cianjur dari teknologi informasi dan komunikasi.

**Kata kunci :** kesenjangan digital, komunitas masyarakat pedesaan, kesenjangan sosial, pemuda.

#### ABSTRACT

*This article aims to explore the digital divide among rural young people in Cianjur Regency, West Java, Indonesia during the Covid-19 pandemic using the concept of third level digital divide initiated by Massimo Ragnedda (2017). Previous studies on the digital divide in rural communities and young people tended to address the issue of the first-level and second-level digital divide, which focused on gap in access and difference experiences in using ICT. However, these studies failed to explain the contribution of digital divide in reproducing social inequality, so this study attempts to explore the reproduction through the third level digital divide analysis. Quantitative data were collected through an online self-administered questionnaire by 368 respondents spread over four villages representing the characteristics of village areas in Cianjur Regency. Statistical test results showed that gender, education level, job class and income levels affected the level of ICT benefits for rural young people in Cianjur Regency. In addition, the characteristics of rural areas as a control variable affected the relationship among the variables of age, gender, education level, job class and income level with the level of ICT benefits. The level of ICT benefits in this case showed the phenomenon of the third level digital divide, a gap between those who benefit from ICT and those who do not. The level of ICT benefits influenced by the above variables indicated that the third-level digital divide reproduced social inequality that has already existed among rural youth in Cianjur Regency, West Java. Demographic factors, social structure conditions and characteristics of rural areas, in this case, became an existing social base and tended to exacerbate the differences in the benefits received by rural youth in Cianjur Regency from information and communication technology.*

**Keyword :** digital divide, rural communities, social inequality, young people.

## PENDAHULUAN

Tulisan ini merupakan kajian tentang ketimpangan sosial yang berfokus pada permasalahan kesenjangan digital. Tulisan ini memiliki kemiripan dengan kajian Guo dan Chen (2011) dan Singh *et al.* (2013), yang mengamati adanya kesenjangan digital, bahkan di tingkat pedesaan. Meskipun memiliki kesamaan, kedua kajian tersebut masih berfokus pada analisis kesenjangan digital tingkat pertama (*first level digital divide*) yang lebih menitikberatkan pada perbedaan akses dan analisis kesenjangan digital tingkat kedua (*second level digital divide*) yang berfokus pada pengalaman dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun tulisan ini mencoba mengeksplorasi kesenjangan digital tingkat ketiga (*third level digital divide*) yang digagas oleh Ragnedda (2017). Selain itu, tulisan ini juga menekankan pada kelompok pemuda pedesaan.

Kesenjangan digital tingkat ketiga (*third level digital divide*) melihat bahwa pengalaman yang berbeda dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pada gilirannya memberikan manfaat yang berbeda-beda. Hal ini merepresentasikan bagaimana kesenjangan digital lantas menguntungkan orang-orang yang telah diuntungkan dan semakin merugikan orang-orang yang telah tertinggal di dalam struktur sosial yang ada dalam menggapai kesempatan hidup (*life chance*) yang lebih baik (Ragnedda, 2017). Oleh karena itulah, perbedaan manfaat TIK dalam hal ini dapat mengukur bagaimana kesenjangan digital tingkat ketiga terjadi.

Perbedaan manfaat tersebut berkaitan dengan kesempatan dalam mengakses keuntungan di berbagai bidang, baik dalam bidang ekonomi, pekerjaan, kemudahan berbisnis, kebahagiaan, pelayanan kesehatan yang lebih baik, maupun gaya hidup yang lebih baik (Brownlee *et al.*, 2010; Guo dan Chen, 2011; Townsend *et al.*, 2013; Venkatesh dan Sykes, 2013; Karar, 2019; dan Chai dan Kalyal, 2019). Aspek-aspek tersebut dapat meningkatkan posisi sosial di masyarakat. Oleh karena itulah, analisis kesenjangan digital tingkat ketiga ini dapat diidentifikasi sebagai aspek yang mampu menggambarkan reproduksi ketimpangan sosial.

Dari kajian yang telah ada sebelumnya, latar belakang demografi, kelas sosial dan karakteristik wilayah sering dilihat menjadi basis ketimpangan sosial yang menyebabkan kesenjangan digital. Hal tersebut akan memengaruhi perbedaan infrastruktur dan akses pada teknologi informasi dan komunikasi yang mencerminkan analisis kesenjangan digital tingkat pertama (Townsend *et al.*, 2013; Wargo *et al.*, 2020; Alam *et al.*, 2019; Guo dan Chen, 2011) maupun dalam memengaruhi perbedaan pengalaman dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yang mencerminkan analisis kesenjangan digital tingkat kedua (Gilbert *et al.*, 2010; Dralega, 2007; Park, 2008; Guo dan Chen, 2011; Singh *et al.*, 2013; Berner *et al.*, 2015; Burkell dan Saginur, 2015; Yan dan Schroeder, 2019; Timmis dan Muhuro, 2019; Lembani *et al.*, 2020). Ketiga faktor tersebut akan dilihat sebagai faktor yang menjadi basis sosial dalam membentuk kesenjangan digital tingkat ketiga di dalam penelitian ini.

Secara lebih spesifik, untuk melihat konteks masyarakat pedesaan, karakteristik wilayah pedesaan di dalam penelitian ini dilihat lebih terdiferensiasi. Hal ini didasari oleh adanya temuan Rao (2008); Guo dan Chen (2011); Singh *et al.* (2013) bahwa kawasan pedesaan memiliki keberagaman, baik dari aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik, yang berperan dalam membentuk karakteristik penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara berbeda-beda dan dalam tujuan penggunaan internet. Dalam melihat bagaimana konteks masyarakat pedesaan di Indonesia berperan dalam membentuk kesenjangan digital tingkat ketiga, karakteristik wilayah pedesaan di dalam penelitian ini juga dilihat secara terdiferensiasi dengan membaginya berdasarkan karakteristik menurut Indeks Desa Membangun (IDM) (Kemendes PDTT).

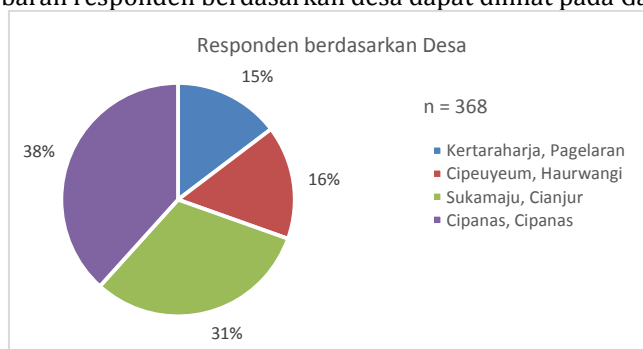
Lokus penelitian ini dilakukan di pedesaan yang ada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia, kondisi kesenjangan digital yang dialami oleh pedesaan semakin nampak. Berdasarkan data APJII (2020b), dari 75.436 desa yang ada di Indonesia, sebanyak 12.548 desa masih belum mendapat akses *broadband* yang layak. Berdasarkan hasil survei KPAI (dalam Hidayat, 2020), diketahui bahwa sebanyak 1.300 desa yang terdapat di Sukabumi, Cianjur dan Garut Selatan masih menghadapi kondisi kualitas internet yang buruk sehingga menyulitkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di masa pandemi Covid-19. Cianjur, dalam hal ini menjadi salah satu kabupaten di provinsi Jawa Barat dengan akses internet pedesaan yang tidak merata. Padahal, Jawa Barat merupakan provinsi dengan kontribusi penetrasi internet terbanyak di Indonesia (APJII, 2020c). Kondisi ketidakmerataan ini menjadi dasar pemilihan Kabupaten Cianjur sebagai lokus penelitian ini.

Berangkat dari uraian di atas, secara umum penelitian ini mencoba menguraikan bentuk reproduksi ketimpangan sosial yang dialami oleh pemuda pedesaan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat melalui analisis kesenjangan digital tingkat ketiga. Hal tersebut akan coba dijawab berdasarkan dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana latar belakang demografi dan kelas sosial memengaruhi tingkat pemanfaatan TIK pada pemuda pedesaan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kedua, bagaimana karakteristik wilayah pedesaan memengaruhi hubungan antara demografi dan kelas sosial dengan tingkat pemanfaatan TIK pada pemuda pedesaan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

## METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan paradigma deduktif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik penelitian kuantitatif dipilih untuk membuktikan dua hipotesis. Hipotesis pertama adalah bahwa latar belakang demografi dan kelas sosial memengaruhi tingkat pemanfaatan TIK. Hipotesis kedua menyatakan bahwa karakteristik wilayah pedesaan memengaruhi hubungan antara latar belakang demografi dan kelas sosial dengan tingkat pemanfaatan TIK. Hubungan pengaruh ini memperlihatkan bagaimana basis ketimpangan sosial direproduksi melalui kesenjangan digital tingkat ketiga.

Data penelitian dikumpulkan pada 21 Maret – 31 Mei 2021 melalui survei, dengan menggunakan kuesioner digital yang diisi mandiri secara daring (*online self-administered questionnaire*) terhadap 368 orang responden yang dipilih berdasarkan teknik *multistage random sampling*. Responden merupakan pemuda pedesaan dengan rentang usia 16 – 30 tahun yang bertempat tinggal di empat desa di Cianjur. Empat desa tersebut mewakili karakteristik wilayah pedesaan yang ada di Cianjur. Dalam hal ini, Desa Kertaraharja mewakili desa tertinggal, Desa Cipeuyeum mewakili desa berkembang, Desa Sukamaju mewakili desa maju sedangkan Desa Cipanas mewakili desa mandiri. Persebaran responden berdasarkan desa dapat dilihat pada Gambar 1.

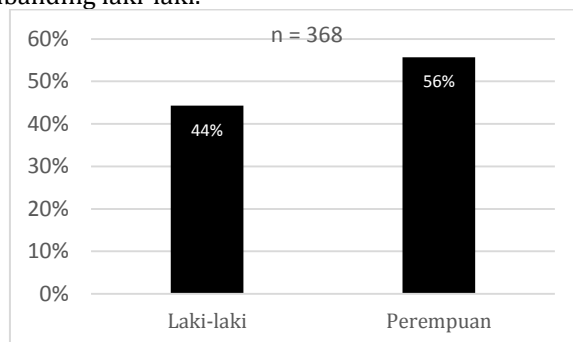


Gambar 1. Responden berdasarkan Desa

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menghasilkan temuan univariat dan menguji hipotesis. Temuan univariat mencakup karakteristik gender, usia, dan tingkat pendidikan yang merepresentasikan latar belakang demografi; kelas pekerjaan dan tingkat pendapatan dan tingkat pemanfaatan TIK pada pemuda pedesaan di Kabupaten Cianjur. Adapun pengujian hipotesis, baik uji hipotesis dengan analisis bivariat maupun uji hipotesis dengan analisis multivariat dilakukan dengan uji statistik Chi-Square untuk variabel berskala nominal dan Somers'd untuk variabel berskala ordinal. Dua uji ini digunakan untuk melihat signifikansi hubungan dan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

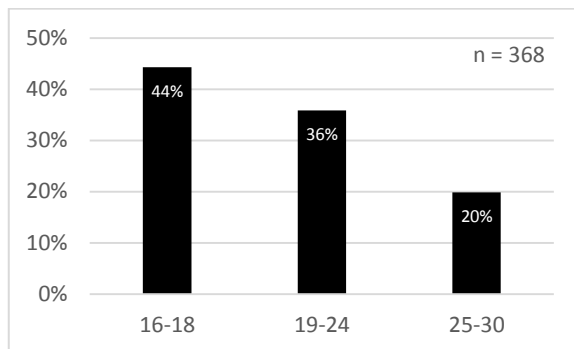
## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menggambarkan konteks penelitian, terlebih dahulu akan diuraikan temuan deskriptif dari data univariat semua variabel yang dianalisis dalam penelitian ini. Gambar 2 memperlihatkan gambaran mengenai responden berdasarkan gender dan persebarannya di tiap desa. Responden di dalam penelitian ini lebih didominasi oleh perempuan dibanding laki-laki.



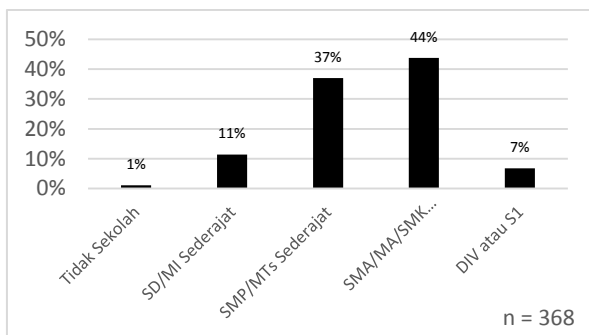
Gambar 2. Responden berdasarkan Usia

Yang kedua, Gambar 3 memperlihatkan persebaran usia responden. Usia pada penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu usia dengan rentang 16-18 tahun yang mewakili usia sekolah menengah, 19-24 tahun yang mewakili usia pendidikan tinggi, dan 25 – 30 tahun yang mewakili usia pascapendidikan tinggi. Dari total 368 responden, responden didominasi oleh pemuda berusia 16 – 24 tahun.



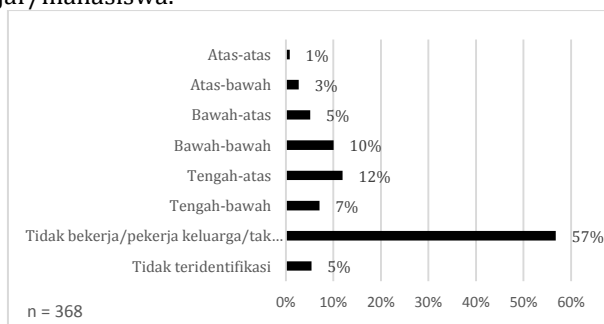
Gambar 3. Responden berdasarkan Usia

Ketiga, Gambar 4 memperlihatkan persebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan pada pemuda pedesaan di Kabupaten Cianjur di dalam penelitian ini lebih didominasi oleh tingkat pendidikan SMA/MA/SMK dan sederajat dibanding tingkat pendidikan lainnya.



Gambar 4. Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keempat, kelas pekerjaan di dalam penelitian ini dibagi menjadi tujuh kelas pekerjaan. Dengan mengacu pada kriteria yang dibuat Pattinasarany (2012) tentang kelas sosial di Jawa Barat dan Jawa Timur, kelas pekerjaan responden tersebut diklasifikasikan ke dalam kriteria tersebut berdasarkan status atau pekerjaan, jabatan bagi PNS dan pegawai swasta, jenis usaha yang dijalankan dan pendapatan per bulan bagi wiraswasta. Pada Gambar 5 tampak bahwa pemuda yang tidak bekerja atau menjadi pekerja keluarga/tak dibayar merupakan kelas pekerjaan terbanyak. Tingginya kelas pekerjaan ini disebabkan banyaknya responden yang masih berstatus sebagai pelajar/mahasiswa.



Gambar 5. Responden berdasarkan Kelas Pekerjaan

Kelima, kelas sosial berdasarkan pendapatan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kelas sosial. Merujuk pada Pattinasarany (2012) dengan menggunakan metode indeks sosial ekonomi, masing-masing kelas diberi proporsi. Kelas atas memiliki bobot 1, kelas tengah memiliki bobot 2, dan kelas bawah memiliki bobot 3. Untuk menghasilkan proporsi sampel pada tiap-tiap kelas, dari pembobotan yang telah dilakukan, dilakukan penghitungan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai bobot kelas sosial}}{\text{Total nilai bobot seluruh kelas sosial}} \times 100 \%$$

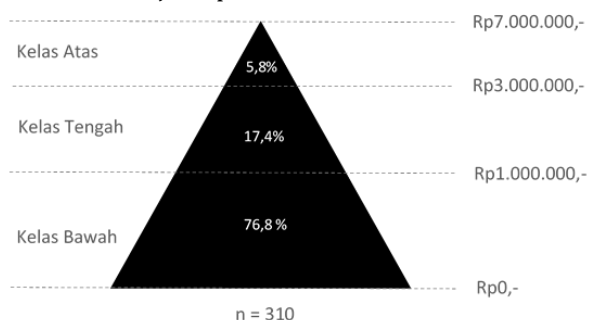
Hasil perhitungan tersebut menghasilkan proporsi bagi tiap-tiap kelas. Masing-masing kelas secara berturut-turut memiliki proporsi jumlah responden sebagai berikut. Kelas atas sebanyak 16,7 persen, kelas tengah sebanyak 33,3 persen dan kelas bawah sebanyak 50,0 persen. Batas bawah dan batas atas setiap proporsi menjadi batas persentil yang digunakan untuk menentukan jangkauan nominal setiap kelas. Maka, didapatkanlah

jangkauan pendapatan setiap kelas untuk setiap kategori kelas. Kategorisasi kelas sosial berdasarkan pendapatan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kategorisasi Kelas Sosial berdasarkan Pendapatan

Kelas Sosial	Jangkauan Pendapatan (%)	Jumlah Pendapatan (Rp per Bulan)
Bawah	$0 \leq X \leq 50,0$	0 – 1.000.000
Tengah	$50,0 < X \leq 83,3$	1.000.001 – 3.000.000
Atas	$83,3 < X \leq 100$	3.000.001 – 7.000.000

Dari total 310 responden yang memiliki informasi mengenai pendapatan per bulan, diketahui bahwa tingkat pendapatan per bulan pada responden di dalam penelitian ini didominasi oleh mereka yang berpendapatan Rp0 – Rp1.000.000 atau tergolong sebagai kelas bawah. Kelas sosial pemuda pedesaan di Kabupaten Cianjur berdasarkan pendapatan dapat dilihat lebih jelas pada Gambar 6.



Gambar 6. Responden berdasarkan Kelas Pekerjaan

Terakhir, analisis univariat dilakukan terhadap variabel tingkat pemanfaatan TIK. Variabel ini diukur dengan 23 indikator pernyataan berskala Likert 1 – 6. Skala 1 mewakili pernyataan sangat tidak setuju, sedangkan skala 6 mewakili pernyataan sangat tidak setuju. Adapun 23 indikator yang ada mewakili beberapa manfaat TIK dalam aspek-aspek berikut, yakni 1) pencarian pekerjaan; 2) berbelanja; 3) berwirausaha; 4) mengakses layanan kesehatan; 5) gaya hidup; 6) keterlibatan politik; 7) bersosialisasi; 8) melakukan pembelajaran; 9) keamanan di dunia siber; 10) berhubungan dengan birokrasi.

Variabel tingkat pemanfaatan TIK kemudian dikategorikan menjadi tiga tingkatan yang berskala ordinal, yaitu tinggi, sedang dan rendah. Merujuk pada Azwar (2010), kategorisasi dapat dilakukan berdasarkan rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Dari data yang telah dimasukkan pada SPSS, didapati nilai batas bawah adalah 29 dan nilai batas atas 138 dengan rata-rata adalah 96,37 dan nilai standar deviasi adalah 22,15. Secara rinci, kategorisasi tingkat pemanfaatan TIK dapat dilihat pada Tabel 2.

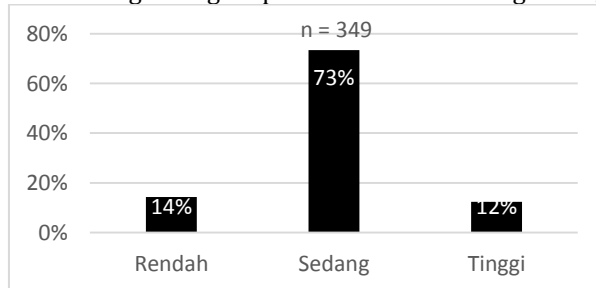
Tabel 2. Kategorisasi Tingkat Pemanfaatan TIK

Tingkat Pemanfaatan TIK	Jangkauan Tingkat Pemanfaatan TIK	Nilai Tingkat Pemanfaatan TIK
Rendah	$X_{min} < X < M - SD$	29 – 74,21
Sedang	$M - SD \leq X < M + SD$	74,22 – 118,51
Tinggi	$M + SD \leq X < X_{maks}$	118,52 – 138

Keterangan:

- X : Nilai tingkat pemanfaatan TIK responden
- $X_{min}$  : Batas bawah nilai tingkat pemanfaatan TIK
- $X_{maks}$  : Batas atas nilai tingkat pemanfaatan TIK
- M : Rata-rata nilai tingkat pemanfaatan TIK
- SD : Standar deviasi nilai tingkat pemanfaatan TIK

Dari total 349 responden yang menggunakan internet, responden dengan tingkat pemanfaatan TIK pada kategori sedang mendominasi proporsi responden, yaitu mencapai 73,4 persen. Persebaran responden dengan tingkat pemanfaatan TIK secara lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 7. Persebaran tersebut setidaknya memperlihatkan bahwa proporsi pemuda dengan tingkat pemanfaatan TIK kategori sedang dan rendah lebih besar dibandingkan dengan pemuda dengan tingkat pemanfaatan TIK kategori tinggi.



Gambar 7. Tingkat Pemanfaatan TIK pada Responden

Berikutnya, dilakukan analisis bivariat untuk menguji beberapa hipotesis berikut:

- Ho : Tidak ada hubungan antara gender dengan tingkat pemanfaatan TIK
- H1 : Terdapat hubungan antara gender dengan tingkat pemanfaatan TIK
- Ho : Tidak ada pengaruh usia terhadap tingkat pemanfaatan TIK
- H2 : Terdapat pengaruh usia terhadap tingkat pemanfaatan TIK
- Ho : Tidak ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pemanfaatan TIK
- H3 : Terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pemanfaatan TIK
- Ho : Tidak ada pengaruh kelas pekerjaan terhadap tingkat pemanfaatan TIK
- H4 : Terdapat pengaruh kelas pekerjaan terhadap tingkat pemanfaatan TIK
- Ho : Tidak ada pengaruh tingkat pendapatan terhadap tingkat pemanfaatan TIK
- H5 : Terdapat pengaruh tingkat pendapatan terhadap tingkat pemanfaatan TIK

Uji hipotesis pertama dilakukan untuk melihat hubungan gender yang berskala nominal dengan tingkat pemanfaatan TIK yang berskala ordinal. Dari Tabel 3 terlihat bahwa pemuda dengan tingkat pemanfaatan TIK yang rendah lebih didominasi oleh kelompok laki-laki dibanding perempuan. Adapun tingkat pemanfaatan yang tinggi mayoritas ditunjukkan oleh perempuan dibanding laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok pemuda pedesaan dengan gender perempuan mendapatkan keuntungan yang lebih baik dibanding laki-laki. Temuan ini menjadi menarik sehingga faktor yang memengaruhinya perlu diteliti lebih lanjut.

Tabel 3. Hubungan Usia dengan Tingkat Pemanfaatan TIK

Gender	Tingkat Pemanfaatan TIK			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
Laki-laki	60.0% (30)	39.5% (101)	46.5% (151)	43,3% (151)
Perempuan	40.0% (20)	60.5% (155)	53.5% (198)	56,7% (198)
<b>Total</b>	<b>100.0% (50)</b>	<b>100.0% (256)</b>	<b>100.0% (43)</b>	<b>100% (349)</b>

Sebagaimana yang terlihat pada Tabel 4, berdasarkan hasil uji Chi-Square, ditemukan bahwa nilai asymp sig (2-sided) sebesar 0,025. Dengan nilai lebih kecil dari alfa ( $0,025 < 0,05$ ), maka Ho ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat diartikan bahwa terdapat hubungan signifikan antara gender dan tingkat pemanfaatan TIK. Kelompok pemuda perempuan memiliki tingkat pemanfaatan TIK yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok pemuda laki-laki.

Tabel 4. Uji Chi-Square Hubungan Usia dengan Tingkat Pemanfaatan TIK

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
<b>Pearson Chi-Square</b>	7.405	2	.025
<b>N of Valid Cases</b>	349		

Adapun pengujian hipotesis berikutnya dilakukan dengan uji statistik Somers'd. Uji statistik ini dilakukan untuk menguji H2 sampai H5. Uji statistik Somers'd dilakukan untuk melihat pengaruh variabel usia, tingkat pendidikan, kelas pekerjaan dan kelas sosial berdasarkan pendapatan dengan variabel tingkat pemanfaatan TIK yang sama-sama berskala ordinal. Signifikansi tersebut dapat terlihat dari nilai Approx. Sig, yang lebih kecil dari alfa ( $0,05$ ), menunjukkan Ho ditolak dan hipotesis alternatif dapat diterima. Adapun derajat kekuatan hubungannya dapat dilihat dari kolom *value*, yang dibandingkan dengan klasifikasi yang dibuat oleh TH Black. Klasifikasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Derajat Kekuatan Hubungan Uji Somers'd menurut TH Black

Nilai	Keterangan
0,0 - 0,2	Sangat lemah, cenderung tidak ada asosiasi
0,21 - 0,4	Lemah, asosiasi lemah
0,41 - 0,7	Sedang, asosiasi sedang
0,71 - 0,9	Kuat, ada asosiasi
0,91 - 1,0	Sangat kuat, sangat terlihat adanya asosiasi

Dari hasil uji Somers'd yang terlihat pada Tabel 6, diketahui bahwa nilai Approx. Sig dari usia adalah 0,163, yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari dari alfa ( $0,163 > 0,05$ ). Dengan demikian, maka Ho diterima, sedangkan H2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh usia terhadap tingkat pemanfaatan TIK pada kalangan pemuda pedesaan di Kabupaten Cianjur.

Adapun untuk variabel tingkat pendidikan, kelas pekerjaan dan kelas sosial berdasarkan pendapatan, masing-masing nilai Approx. Sig. lebih kecil daripada alfa. Nilai Approx. Sig. tingkat pendidikan adalah 0,015 ( $0,015 < 0,05$ ), kelas pekerjaan 0,004 ( $0,004 < 0,05$ ) dan kelas sosial berdasarkan pendapatan 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ). Dengan demikian, Ho ditolak dan H2, H3 dan H4 sebagai hipotesis alternatif dapat diterima. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan, kelas pekerjaan dan kelas sosial berdasarkan pendapatan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pemanfaatan TIK pada kalangan pemuda pedesaan di Kabupaten Cianjur.

Selanjutnya, tingkat pendidikan memiliki nilai Somers'd 0,100. Adapun kelas pekerjaan memiliki nilai Somers'd 0,111. Sementara itu, kelas sosial berdasarkan pendapatan memiliki nilai Somers'd 0,213. Berdasarkan

derajat kekuatan hubungan yang dibuat oleh TH Black, dapat disimpulkan bahwa hubungan atau pengaruh tingkat pendidikan dan kelas pekerjaan terhadap tingkat pemanfaatan TIK sangat lemah. Pengaruh tingkat kelas sosial berdasarkan pendapatan terhadap tingkat pemanfaatan TIK juga terkategori lemah. Pengaruhnya pun bersifat positif karena nilai Somers'd menghasilkan angka positif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, kelas pekerjaan dan semakin tinggi posisi kelas sosial pemuda pedesaan, semakin tinggi tingkat pemanfaatan TIK yang mereka tunjukkan. Demikian juga sebaliknya.

Tabel 6. Hasil Uji Somers'd Variabel Usia, Tingkat Pendidikan, Kelas Pekerjaan dan Kelas Sosial berdasarkan Pendapatan dengan Variabel Tingkat Pemanfaatan TIK

		Value	Approx. Sig.
<b>Somers'd</b>	<i>Symmetric</i>	0.069	0.163
	<i>Usia Dependent</i>	0.086	0.163
	<i>Tingkat Pemanfaatan TIK Dependent</i>	<b>0.057</b>	<b>0.163</b>
<b>Somers' d</b>	<i>Symmetric</i>	0.120	0.015
	<i>Tingkat Pendidikan Dependent</i>	0.152	0.015
	<i>Tingkat Pemanfaatan TIK Dependent</i>	<b>0.100</b>	<b>0.015</b>
<b>Somers' d</b>	<i>Symmetric</i>	0.130	0.004
	<i>Kelas Pekerjaan Dependent</i>	0.158	0.004
	<i>Tingkat Pemanfaatan TIK Dependent</i>	<b>0.111</b>	<b>0.004</b>
<b>Somers' d</b>	<i>Symmetric</i>	0.202	0.000
	<i>Kelas Sosial Pendapatan Dependent</i>	0.191	0.000
	<i>Tingkat Pemanfaatan TIK Dependent</i>	<b>0.213</b>	<b>0.000</b>

Terakhir, analisis multivariat dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh karakteristik wilayah pedesaan terhadap hubungan bivariat yang telah diuji sebelumnya. Hipotesis dari analisis multivariat tersebut adalah sebagai berikut:

Ho : Tidak ada pengaruh karakteristik wilayah pedesaan terhadap hubungan antara gender dengan tingkat pemanfaatan TIK

H6 : Terdapat pengaruh karakteristik wilayah pedesaan terhadap hubungan antara gender dengan tingkat pemanfaatan TIK

Ho : Tidak ada pengaruh karakteristik wilayah pedesaan terhadap hubungan antara usia dengan tingkat pemanfaatan TIK

H7 : Terdapat pengaruh karakteristik wilayah pedesaan terhadap hubungan antara usia dengan tingkat pemanfaatan TIK

Ho : Tidak ada pengaruh karakteristik wilayah pedesaan terhadap hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pemanfaatan TIK

H8 : Terdapat pengaruh karakteristik wilayah pedesaan terhadap hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pemanfaatan TIK

Ho : Tidak ada pengaruh karakteristik wilayah pedesaan terhadap hubungan antara kelas pekerjaan dengan tingkat pemanfaatan TIK

H9 : Terdapat pengaruh karakteristik wilayah pedesaan terhadap hubungan antara kelas pekerjaan dengan tingkat pemanfaatan TIK

Ho : Tidak ada pengaruh karakteristik wilayah pedesaan terhadap hubungan antara kelas sosial berdasarkan pendapatan dengan tingkat pemanfaatan TIK

H10: Terdapat pengaruh karakteristik wilayah pedesaan terhadap hubungan antara kelas pekerjaan dengan tingkat pemanfaatan TIK

Pertama, dilakukan analisis multivariat untuk melihat bagaimana pengaruh karakteristik wilayah pedesaan terhadap hubungan antara gender dan tingkat pemanfaatan TIK. Berdasarkan hasil uji Chi-Square pada Tabel 7, dapat dilihat bahwa nilai asymp sig (2-sided) sebesar 0,007. Dengan nilai lebih kecil dari alfa ( $0,007 < 0,05$ ), maka Ho ditolak dan H6 diterima. Hubungan antara gender dengan tingkat pemanfaatan TIK dipengaruhi oleh karakteristik wilayah pedesaan, khususnya pada desa maju.

Tabel 7. Uji Chi-Square Pengaruh Karakteristik Wilayah Pedesaan terhadap Hubungan Gender dengan Tingkat Pemanfaatan TIK

Karakteristik Wilayah Pedesaan		Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
<b>Desa Tertinggal</b>	Pearson Chi-Square	2.734	2	0.255
	N of Valid Cases	54		
<b>Desa Berkembang</b>	Pearson Chi-Square	1.948	2	0.378
	N of Valid Cases	54		
<b>Desa Maju</b>	Pearson Chi-Square	10.045	2	<b>0.007</b>
	N of Valid Cases	112		
<b>Desa Mandiri</b>	Pearson Chi-Square	2.039	2	0.361
	N of Valid Cases	129		

Kedua, Tabel 8 menampilkan pengaruh karakteristik wilayah pedesaan terhadap hubungan antara usia dan tingkat pemanfaatan TIK. Hasil uji Somers'd memperlihatkan bahwa pengaruh usia terhadap tingkat pemanfaatan TIK di desa tertinggal memiliki nilai approx. Sig. yang lebih kecil dari alfa ( $0,006 < 0,05$ ), yang menandakan adanya hubungan yang signifikan di antara keduanya. Derajat kekuatan terkategori sebagai hubungan lemah dengan nilai Somers'd 0,253. Temuan ini memperlihatkan bahwa variabel karakteristik wilayah pedesaan memengaruhi hubungan antara usia dengan tingkat pemanfaatan TIK, khususnya pada karakteristik wilayah desa tertinggal. Dengan demikian, Ho ditolak dan H7 sebagai hipotesis alternatif diterima.

Tabel 8. Hasil Uji Somers'd Pengaruh Karakteristik Wilayah Pedesaan terhadap Hubungan antara Usia dengan Tingkat Pemanfaatan TIK

Karakteristik Wilayah Pedesaan			Value	Approx. Sig.
Desa Tertinggal	Somers'd	<i>Symmetric</i>	0.311	0.006
		<i>Usia Dependent</i>	0.405	0.006
		Tingkat Pemanfaatan TIK <i>Dependent</i>	<b>0.253</b>	<b>0.006</b>
Desa Berkembang	Somers' d	<i>Symmetric</i>	0.042	0.749
		<i>Usia Dependent</i>	0.055	0.749
		Tingkat Pemanfaatan TIK <i>Dependent</i>	<b>0.034</b>	<b>0.749</b>
Desa Maju	Somers' d	<i>Symmetric</i>	0.015	0.865
		<i>Usia Dependent</i>	0.017	0.865
		Tingkat Pemanfaatan TIK <i>Dependent</i>	<b>0.013</b>	<b>0.865</b>
Desa Mandiri	Somers' d	<i>Symmetric</i>	0.138	0.127
		<i>Usia Dependent</i>	0.182	0.127
		Tingkat Pemanfaatan TIK <i>Dependent</i>	<b>0.111</b>	<b>0.127</b>

Ketiga, pada Tabel 9 tampak pengaruh karakteristik wilayah pedesaan terhadap hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat pemanfaatan TIK. Dari hasil uji Somers'd diketahui bahwa pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pemanfaatan TIK di desa tertinggal memiliki nilai approx. Sig. yang lebih kecil dari alfa ( $0,006 < 0,05$ ), yang menandakan adanya hubungan yang signifikan. Derajat kekuatannya naik dari yang sebelumnya berada pada nilai Somers'd 0,100 (Tabel 6) menjadi 1,159 (Tabel 9), khususnya di wilayah desa maju. Meskipun masih terkategori sangat lemah, ada indikasi menguatnya hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pemanfaatan TIK di desa maju. Dengan demikian, Ho ditolak dan H8 sebagai hipotesis alternatif diterima.

Tabel 9. Hasil Uji Somers'd Pengaruh Karakteristik Wilayah Pedesaan terhadap Hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Pemanfaatan TIK

Karakteristik Wilayah Pedesaan			Value	Approx. Sig.
Desa Tertinggal	Somers'd	<i>Symmetric</i>	-0.073	0.562
		Tingkat Pendidikan <i>Dependent</i>	-0.099	0.562
		Tingkat Pemanfaatan TIK <i>Dependent</i>	<b>-0.057</b>	<b>0.562</b>
Desa Berkembang	Somers' d	<i>Symmetric</i>	0.199	0.141
		Tingkat Pendidikan <i>Dependent</i>	0.267	0.141
		Tingkat Pemanfaatan TIK <i>Dependent</i>	<b>0.159</b>	<b>0.141</b>
Desa Maju	Somers' d	<i>Symmetric</i>	0.212	0.006
		Tingkat Pendidikan <i>Dependent</i>	0.254	0.006
		Tingkat Pemanfaatan TIK <i>Dependent</i>	<b>0.181</b>	<b>0.006</b>
Desa Mandiri	Somers' d	<i>Symmetric</i>	0.120	0.132
		Tingkat Pendidikan <i>Dependent</i>	0.148	0.132
		Tingkat Pemanfaatan TIK <i>Dependent</i>	<b>0.101</b>	<b>0.132</b>

Keempat, pada Tabel 10 terlihat bagaimana pengaruh karakteristik wilayah pedesaan terhadap hubungan antara kelas pekerjaan dan tingkat pemanfaatan TIK. Dari hasil uji Somers'd diketahui bahwa pengaruh kelas pekerjaan terhadap tingkat pemanfaatan TIK di desa tertinggal dan desa mandiri memiliki nilai Approx. Sig. yang lebih kecil dari alfa ( $0,002 < 0,05$  untuk desa tertinggal;  $0,000 < 0,05$  untuk desa mandiri). Hal ini menandakan adanya hubungan yang signifikan antara kelas pekerjaan dengan tingkat pemanfaatan TIK, khususnya di wilayah desa tertinggal dan desa mandiri. Derajat kekuatannya pun naik dari yang sebelumnya berada pada nilai



Somers'd 0,111 (Tabel 6) menjadi 0,396 pada desa tertinggal dan 0,222 pada desa mandiri (Tabel 10). Meskipun masih terkategori sangat lemah berdasarkan kategori TH Black, ada indikasi menguatnya hubungan antara kelas pekerjaan dengan tingkat pemanfaatan TIK di desa maju. Dengan demikian, Ho ditolak dan H9 sebagai hipotesis alternatif diterima.

Tabel 10. Hasil Uji Somers'd Pengaruh Karakteristik Wilayah Pedesaan terhadap Hubungan antara Kelas Pekerjaan dengan Tingkat Pemanfaatan TIK

Karakteristik Wilayah Pedesaan			Value	Approx. Sig.
Desa Tertinggal	Somers'd	<i>Symmetric</i>	0.423	0.002
		Kelas Pekerjaan <i>Dependent</i>	0.455	0.002
		Tingkat Pemanfaatan TIK <i>Dependent</i>	<b>0.396</b>	<b>0.002</b>
Desa Berkembang	Somers' d	<i>Symmetric</i>	-0.124	0.365
		Kelas Pekerjaan <i>Dependent</i>	-0.129	0.365
		Tingkat Pemanfaatan TIK <i>Dependent</i>	<b>-0.119</b>	<b>0.365</b>
Desa Maju	Somers' d	<i>Symmetric</i>	0.015	0.844
		Kelas Pekerjaan <i>Dependent</i>	0.018	0.844
		Tingkat Pemanfaatan TIK <i>Dependent</i>	0.012	0.844
Desa Mandiri	Somers' d	<i>Symmetric</i>	0.279	0.000
		Kelas Pekerjaan <i>Dependent</i>	0.377	0.000
		Tingkat Pemanfaatan TIK <i>Dependent</i>	<b>0.222</b>	<b>0.000</b>

Kelima, pada Tabel 11, terlihat bagaimana pengaruh karakteristik wilayah pedesaan terhadap hubungan antara kelas sosial berdasarkan pendapatan dengan tingkat pemanfaatan TIK. Dari hasil uji Somers'd, terlihat bahwa pengaruh pendapatan terhadap tingkat pemanfaatan TIK di desa mandiri memiliki nilai approx. Sig. yang lebih kecil dari alfa ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini menandakan adanya hubungan yang signifikan antara kelas pekerjaan dengan tingkat pemanfaatan TIK, khususnya di wilayah desa mandiri. Derajat kekuatannya pun naik dari yang sebelumnya berada pada kategori lemah dengan nilai Somers'd 0,212 (Tabel 6) menjadi kategori sedang dengan nilai Somers'd 0,446 (Tabel 11) di wilayah desa mandiri. Dengan demikian, Ho ditolak dan H10 sebagai hipotesis alternatif diterima.

Tabel 11. Hasil Uji Somers'd Pengaruh Karakteristik Wilayah Pedesaan terhadap Hubungan antara Kelas Sosial berdasarkan Pendapatan dengan Tingkat Pemanfaatan TIK

Karakteristik Wilayah Pedesaan			Value	Approx. Sig.
Desa Tertinggal	Somers'd	<i>Symmetric</i>	-0.023	0.844
		Kelas Sosial Pendapatan <i>Dependent</i>	-0.018	0.844
		Tingkat Pemanfaatan TIK <i>Dependent</i>	<b>-0.032</b>	<b>0.844</b>
Desa Berkembang	Somers' d	<i>Symmetric</i>	-0.080	0.535
		Kelas Sosial Pendapatan <i>Dependent</i>	-0.061	0.535
		Tingkat Pemanfaatan TIK <i>Dependent</i>	<b>-0.118</b>	<b>0.535</b>
Desa Maju	Somers' d	<i>Symmetric</i>	0.083	0.272
		Kelas Sosial Pendapatan <i>Dependent</i>	0.077	0.272
		Tingkat Pemanfaatan TIK <i>Dependent</i>	<b>0.090</b>	<b>0.272</b>
Desa Mandiri	Somers' d	<i>Symmetric</i>	0.509	0.000
		Kelas Sosial Pendapatan <i>Dependent</i>	0.592	0.000
		Tingkat Pemanfaatan TIK <i>Dependent</i>	<b>0.446</b>	<b>0.000</b>

Dari hasil temuan di atas, dapat dipahami bahwa basis sosial seperti latar belakang demografi, kelas sosial dan karakteristik wilayah pedesaan ternyata memberikan pengaruh terhadap tingkat pemanfaatan TIK. Temuan ini sekaligus mengonfirmasi gagasan Ragnedda (2017) yang melihat bahwa melalui kesenjangan digital tingkat ketiga yang terukur dari tingkat pemanfaatan TIK, ketimpangan sosial yang sebelumnya sudah hadir dapat direproduksi kembali melalui kesenjangan digital.

Bentuk reproduksi tersebut paling terlihat dari bagaimana ketimpangan dalam aspek pendidikan, kelas pekerjaan dan kelas sosial berdasarkan pendapatan diperparah dengan adanya kesenjangan digital. Dalam hal ini, semakin tinggi pendidikan seseorang dan semakin tinggi kelas pekerjaan serta kelas sosial seseorang,

semakin besar peluang mereka mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, dan semakin rendah kelas pekerjaan serta kelas sosial seseorang, semakin rendah juga kesempatan hidup yang lebih baik untuk bisa mereka dapatkan karena rendahnya manfaat yang didapat dari teknologi informasi dan komunikasi. Ketimpangan dalam aspek usia pun bahkan hadir secara spesifik di wilayah dengan karakteristik desa maju.

Namun demikian, temuan menarik justru hadir dari hubungan antara gender dengan tingkat pemanfaatan TIK. Dari literatur-literatur sebelumnya, perempuan selalu lebih tertinggal dalam akses dan penggunaan teknologi. Namun, dari temuan yang ada, lebih banyak perempuan muda pedesaan yang justru mendapatkan manfaat dari TIK lebih tinggi dibanding pemuda laki-laki. Hal ini menjadi temuan menarik dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya.

Terakhir, hasil temuan multivariat juga membuktikan bahwa perbedaan karakteristik wilayah pedesaan ternyata memberikan kontribusi dalam mereproduksi ketimpangan sosial berbasis usia dan kelas sosial. Kondisi ketimpangan usia, gender, tingkat pendidikan, kelas pekerjaan dan kelas sosial berdasarkan pendapatan ternyata menjadi lebih kuat di beberapa wilayah pedesaan dengan karakteristik tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa konteks masyarakat desa yang berbeda-beda memang memberikan kontribusi dalam mereproduksi ketimpangan sosial pada pemuda pedesaan dengan latar belakang demografi dan kelas sosial yang berbeda.

## KESIMPULAN

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa reproduksi ketimpangan sosial pada pemuda pedesaan di Kabupaten Cianjur terjadi melalui mekanisme kesenjangan digital tingkat ketiga. Gender, usia dan tingkat pendidikan sebagai basis sosial berdasarkan karakteristik demografi; serta kelas pekerjaan dan kelas sosial berdasarkan pendapatan yang merepresentasikan kondisi struktur sosial di masyarakat menjadi basis sosial yang sudah timpang dan berpotensi untuk semakin diperparah dengan adanya perbedaan keuntungan yang didapat oleh pemuda pedesaan di Kabupaten Cianjur dari teknologi informasi dan komunikasi. Di samping itu, perbedaan konteks masyarakat pedesaan yang diukur dengan karakteristik wilayah pedesaan juga ternyata turut berkontribusi dalam mereproduksi ketimpangan sosial tersebut.

Secara teoretis, temuan ini memberikan kontribusi penting pada pengembangan analisis ketimpangan sosial dan kesenjangan digital. Pertama, analisis kesenjangan digital adalah analisis yang sangat berkaitan erat dan tidak dapat dilepaskan dari analisis mengenai ketimpangan sosial. Kedua, analisis kesenjangan digital tidak hanya cukup berfokus pada perbedaan akses terhadap infrastruktur dan perbedaan penggunaan semata, tapi juga harus melibatkan aspek kebermanfaatannya dalam mereduksi ketimpangan sosial yang ada. Ketiga, diferensiasi karakteristik wilayah yang sangat beragam, terutama di pedesaan dengan konteks masyarakatnya yang berbeda-beda harus teridentifikasi dalam melihat kondisi kesenjangan digital, karena temuan di suatu wilayah dengan kultur masyarakat yang berbeda belum tentu menjadi temuan yang sama di wilayah lainnya. Namun demikian, perlu ada studi lanjutan untuk mengkaji mengapa perbedaan karakteristik wilayah pedesaan tersebut berkontribusi dalam menciptakan kesenjangan digital.

Secara praktis, temuan ini juga menjadi penting untuk menjadi dasar penyusunan atau perbaikan regulasi transformasi digital di Indonesia. Pertama, penting untuk memperhatikan aspek basis sosial di masyarakat secara umum, dan secara khususnya di kalangan pemuda, di samping pemerataan akses infrastruktur, karena kesenjangan digital belum tentu terjembatani dengan adanya infrastruktur yang merata jika basis sosial di masyarakat masih mengalami ketimpangan. Kedua, dalam menyusun kebijakan tentang transformasi digital di pedesaan, penting untuk melihat beragamnya kondisi pedesaan di Indonesia. Tanpa melihat spektrum perbedaan ini, implementasi transformasi digital di pedesaan, khususnya pada kalangan pemuda berpotensi menjadi salah sasaran. Kesalahan ini berpotensi memperlebar ketimpangan sosial yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan temuan di atas, terdapat beberapa rekomendasi untuk menanggulangi masalah kesenjangan digital yang dialami oleh masyarakat pedesaan. Pertama, pemerintah perlu mengenali potensi dan karakteristik wilayah pedesaan dalam menyusun kebijakan penanggulangan kesenjangan digital. Kedua, pemerintah perlu menjalankan program afirmasi pelatihan atau pendidikan teknologi informasi dan komunikasi bagi pemuda pedesaan dengan memperhatikan latar belakang demografi dan kondisi struktur sosial pada pemuda pedesaan dan bukan hanya sekadar membangun infrastruktur digital di pedesaan.

## ACKNOWLEDGMENT

Penulis berterima kasih kepada Prof. Iwan Gardono Sujatmiko, Ph.D. yang telah membimbing penulis dalam penyusunan artikel ilmiah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, G. M., Alam, K., Mushtaq, S., Khatun, M. N., & Mamun, M. A. K. (2019). Influence of socio-demographic factors on mobile phone adoption in rural Bangladesh: Policy implications. *Information Development*, 35(5), 739–748. <https://doi.org/10.1177/0266666918792040>
- APJII. 2020b. Alokasi Dana Desa Dorong Penetrasi Internet di Daerah. *Buletin APJII Edisi 76 Des 2020*. Tersedia di <https://apjii.or.id/content/read/104/508/BULETIN-APIII-EDISI-76---Desember-2020> (diakses pada 21 Mei 2021 pukul 01.20 WIB).
- APJII. 2020c. Laporan Survei Internet APJII 2019 – 2020 (Q2). Tersedia di <https://apjii.or.id/survei> (diakses pada 21 Mei 2021 pukul 13.04 WIB).
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bailey, J. (2016). University of Ottawa Press. *EAcces to Justice, May 2020*, 177–213. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt5hjk9x.8>
- Berner, J., Rennemark, M., Jogr eus, C., Anderberg, P., Sk oldunger, A., Wahlberg, M., Elmst ahl, S., & Berglund, J. (2015). Factors influencing Internet usage in older adults (65 years and above) living in rural and urban Sweden. *Health Informatics Journal*, 21(3), 237–249. <https://doi.org/10.1177/1460458214521226>
- Brownlee, K., Graham, J. R., Doucette, E., Hotson, N., Brownlee, K., Graham, J. R., Doucette, E., Hotson, N., & Halverson, G. (2010). *Influenced Rural Social Work Practice ? 40(2)*, 622–637.
- Chai, X., & Kalyal, H. (2019). Cell Phone Use and Happiness Among Chinese Older Adults: Does Rural/Urban Residence Status Matter? *Research on Aging*, 41(1), 85–109. <https://doi.org/10.1177/0164027518792662>
- Dralega, C. (2011). Rural women ’ s ICT use in Uganda : Collective action for development. *Agenda: Empowering Women for Gender Equity*, 21(71), 42–52.
- Gilbert, E., Karahalios, K., & Sandvig, C. (2010). The network in the garden: Designing social media for rural life. *American Behavioral Scientist*, 53(9), 1367–1388. <https://doi.org/10.1177/0002764210361690>
- Guo, Y., & Chen, P. (2011). Digital divide and social cleavage: Case studies of ICT usage among peasants in contemporary China. *China Quarterly*, 207(207), 580–599. <https://doi.org/10.1017/S030574101100066X>
- Hidayat, Wandha Nur. 2020. Kemendikbud Gagap PJJ, Ketimpangan Pembelajaran Kian Lebar. Tersedia di <https://www.validnews.id/Kemendikbud-Gagap-PJJ--Ketimpangan-Pembelajaran-Kian-Lebar-EcX> (diakses pada 3 Desember 2020 pukul 01:07 WIB).
- Karar, H. (2019). Algorithmic Capitalism and the Digital Divide in Sub-Saharan Africa. *Journal of Developing Societies*, 35(4), 514–537. <https://doi.org/10.1177/0169796X19890758>
- Lembani, R., Gunter, A., Breines, M., & Dalu, M. T. B. (2020). The same course, different access: the digital divide between urban and rural distance education students in South Africa. *Journal of Geography in Higher Education*, 44(1), 70–84. <https://doi.org/10.1080/03098265.2019.1694876>
- Park, Youn-Min (2008). *Reassessing Korean IT Policy to Link Rural Online: The Missing Gap of Korean Rural E-Readiness*. *Journal of International and Area Studies*, Vol. 15, No. 2 (December 2008), pp. 69-85.
- Ragnedda, M. (2017). The Third Digital Divide. In *The Third Digital Divide*. <https://doi.org/10.4324/9781315606002>
- Rao, S. S. (2008). Social development in Indian rural communities: Adoption of telecentres. *International Journal of Information Management*, 28(6), 474–482. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2008.01.001>
- Singh, N., Zhou, Y., Williams, K., Kendall, J., & Kaushik, P. D. (2013). Bridging the Digital Divide in Rural India. *Review of Market Integration*, 5(1), 1–42. <https://doi.org/10.1177/0974929213496499>
- Timmis, S., & Muhuro, P. (2019). De-coding or de-colonising the technocratic university? Rural students’ digital transitions to South African higher education. *Learning, Media and Technology*, 44(3), 252–266. <https://doi.org/10.1080/17439884.2019.1623250>
- Townsend, L., Sathiaseelan, A., Fairhurst, G., & Wallace, C. (2013). Enhanced broadband access as a solution to the social and economic problems of the rural digital divide. *Local Economy*, 28(6), 580–595. <https://doi.org/10.1177/0269094213496974>
- Pattinasarany, Indera Ratna Irawaty (2012). *Mobilitas Sosial Vertikal Antar Generasi: Kajian terhadap Masyarakat Kota di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur*. Disertasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 2012.
- Venkatesh, V., & Sykes, T. A. (2013). Digital divide initiative success in developing countries: A longitudinal field study in a village in India. *Information Systems Research*, 24(2), 239–260. <https://doi.org/10.1287/isre.1110.0409>
- Wargo, E., Carr Chellman, D., Budge, K., & Canfield Davis, K. (2020). On the digital frontier: Stakeholders in rural areas take on educational technology and schooling. *Journal of Research on Technology in Education*, 0(0), 1–19. <https://doi.org/10.1080/15391523.2020.1760753>
- Yan, P., & Schroeder, R. (2020). Variations in the adoption and use of mobile social apps in everyday lives in urban and rural China. *Mobile Media and Communication*, 8(3), 318–341. <https://doi.org/10.1177/2050157919884718>